

Pemerintah Provinsi Lampung
Laporan Kinerja
TAHUN ANGGARAN 2017



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id

E-Mail : perencanaankoperasi15@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dan sebagai bahan suplemen laporan pertanggungjawaban Gubernur Lampung, yang disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung selama Tahun 2017, dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Dari laporan ini dapat diperoleh suatu gambaran pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran perbaikan agar laporan ini dapat lebih sempurna.

Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Januari 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	4
1.4 Struktur Organisasi SKPD.....	5
1.5 Isu Strategis/Permasalahan SKPD	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis SKPD 2015 - 2019.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.....	19
2.3 Rencana Anggaran	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Perbandingan Realisasi Renja Tahun 2017 Terhadap Renstra.....	38
3.4 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017	40
3.5 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2017	50
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung. Untuk mencapai visi dan misi yang diemban oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung perlu didukung dengan adanya program dan kegiatan serta sumber daya manusia.

Pada tahun 2017 Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD sebesar Rp 9.709.019.000,00 yang terdiri 10 program dan 48 kegiatan dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.663.242.566,00 sehingga capaian sasaran strategis pada tahun 2017 mencapai 89,23%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah “Sangat Tinggi” untuk 5 (lima) indikator kinerja karena interval nilai realisasi kinerja di atas 91 dan “Tinggi” untuk 1 (satu) indikator kinerja karena interval nilai realisasi kinerja di antara 76 – 90, dengan rincian sebagai berikut :

- J) Persentase pertumbuhan jumlah Koperasi Aktif Tahun 2017 sebesar 17,91% atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 138% dari 13% koperasi yang ditargetkan.
- J) Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi (karyawan dan manajer) sebesar 6,16% atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 154% dari 4% tenaga kerja yang ditargetkan.
- J) Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha (omset) koperasi sebesar 0,62% atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 77,5% dari 0,8% yang ditargetkan.
- J) Persentase pertumbuhan wirausaha baru sebesar 320% atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 160% dari 200% yang ditargetkan.
- J) Jumlah UKM sebesar 99.307 unit atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 103% dari 96.011 unit yang ditargetkan.
- J) Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, paten sebesar 108,33% atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 144% dari 75% yang ditargetkan.

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pangsa pasar, aksesibilitas yang rendah terhadap sumber daya produktif serta rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi.

Solusi dalam menghadapi permasalahan dan kendala di atas antara lain dengan melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi, sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, diklat bagi Pembina Koperasi dan UKM, peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan dengan bunga rendah dan melakukan Penyuluhan Perkoperasian.

Bandar Lampung, Januari 2018

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19610307 198603 1 007

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj).

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas untuk penyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Melalui laporan kinerja diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh seorang atau suatu unit organisasi. Oleh karena itu dalam menjawab atau memberikan keterangan mengenai kinerja atas tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada saat ini tuntutan akan akuntabilitas semakin menguat seiring dengan tingginya harapan untuk menciptakan suatu penyelenggara pemerintah yang baik.

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
6. Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2009 tentang Penyampaian Lakip dan Penetapan Indikator Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 ini meliputi :

- 1) Aspek Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban dinas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2017.

- J) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen dinas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja (*performance gap*) yang ditemukan, manajemen dinas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai petunjuk penyusunan Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017.

Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Dinas dan kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).

LKj memiliki dua fungsi utama sekaligus:

- Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi dinas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang terkait atau *stakeholders*.
- Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj oleh setiap instansi pemerintah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok

- 1) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
 - b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
 - c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
 - d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
 - f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- j. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi SKPD

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan;
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi , membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
 - g. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - h. UPTD Perkuatan Modal KUKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Teknis Operasional;
 - i. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pelayanan Usaha;
 - 3) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g,h dan i, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g, h dan i, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.5 Isu Strategis/Permasalahan SKPD

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD merupakan strategi awal dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Langkah ini merupakan tinjauan ke dalam melalui analisis lingkungan internal..

Analisis lingkungan internal difokuskan pada dua aspek yaitu analisis kekuatan (*strength*) dan analisis kelemahan (*weaknesses*). Kelemahan merupakan faktor yang dapat berpengaruh negatif dalam pencapaian visi dan misi, oleh karena itu kelemahan perlu diupayakan untuk diminimalisir.

Perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM merupakan acuan yang menjadi rujukan dalam perumusan perencanaan pada tingkat provinsi/daerah.

Dokumen-dokumen perencanaan pada tingkat nasional tersebut memberikan arahan yang jelas, integratif dan komprehensif yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung relatif telah memenuhi syarat untuk melaksanakan fungsinya dan cukup akomodatif serta representatif. Pembagian dan distribusi peran serta tugas yang jelas yang termanifestasi dalam berbagai unit/satuan/bidang kerja disertai dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menjadi salah satu modal dasar bagi kesuksesan pembangunan Koperasi dan UKM.

Terkait dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM secara umum jumlah dan tingkat pendidikannya cukup memadai dan hal ini merupakan modal dasar organisasi untuk dapat maju dan melangkah.

Kondisi sumber daya manusia secara eksplisit merepresentasikan ketersediaan yang cukup memadai baik itu ditinjau dari segi kompetensinya

maupun dari segi efisiensi manajerialnya. Khusus yang berkaitan dengan kompetensiFungsional Widyaiswara, kelompok fungsional tersebut berperan sebagai katalisator sekaligus mentor dalam peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di lingkungan dinas serta *stakeholder* lainnya. Dengan demikian dari aspek sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM beberapa factor yang dapat menjadi kekuatan yaitu: (a) Jumlah personil pengelola SKPD (b) Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup lengkap dan memadai, (c) Tersedianya kelompok widyaiswara yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik untuk internal maupun kepada *stakeholders* terkait.

Komponen manajemen merupakan unsur yang cukup berarti sebagai sumber kekuatan dari internal. Oleh karena itu kekuatan yang dapat diidentifikasi dari unsur manajemen ini antara lain: (a) Struktur Organisasi SKPD cukup memadai; (b) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sangat jelas, (c) Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada kapasitas dan kompetensi personil, (d) Telah menerapkan manajemen moderen dengan dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Kemudian sebagai sumber kekuatan ketiga, adalah dari sistem pendukung organisasi. Teridentifikasi bahwa sarana pendukung yang terkait dengan kesekretariatan dan kelembagaan SKPD, terkait dengan Bidang Fasilitasi Pembiayaan, terkait dengan UPTD Perkuatan Permodalan. Wujud konkrit sarana pendukung tersebut meliputi (a) jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai, (b) tersedia fasilitas penguatan modal untuk koperasi dan UKM baik dana APBN maupun APBD. Disamping itu juga tersedia sarana pendukung berupa fasilitas pelatihan dan promosi ekspor produk-produk yang terkait dengan koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi terkait dengan komponen sumberdaya manusia, manajemen, dan sarana pendukung pada unsur kelembagaan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

A. Koperasi dan UKM:

1. Penguasaan ilmu dan teknologi masih rendah
2. Penguasaan wawasan tentang koperasi masih rendah
3. Keterampilan berkomunikasi para petugas masih rendah
4. Keterampilan petugas dalam penataan data SKPD masih lemah
5. Disiplin para pegawai masih kurang
6. Kompetensi sumber daya manusia pada level pimpinan lemah
7. Etos kerja aparatur masih rendah
8. Kinerja petugas remedial dana bergulir rendah
9. Kinerja petugas dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan masih rendah
10. Jumlah dana untuk penguatan modal UKM dan Koperasi sangat terbatas
11. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan Bidang Koperasi dan UKM masih terbatas

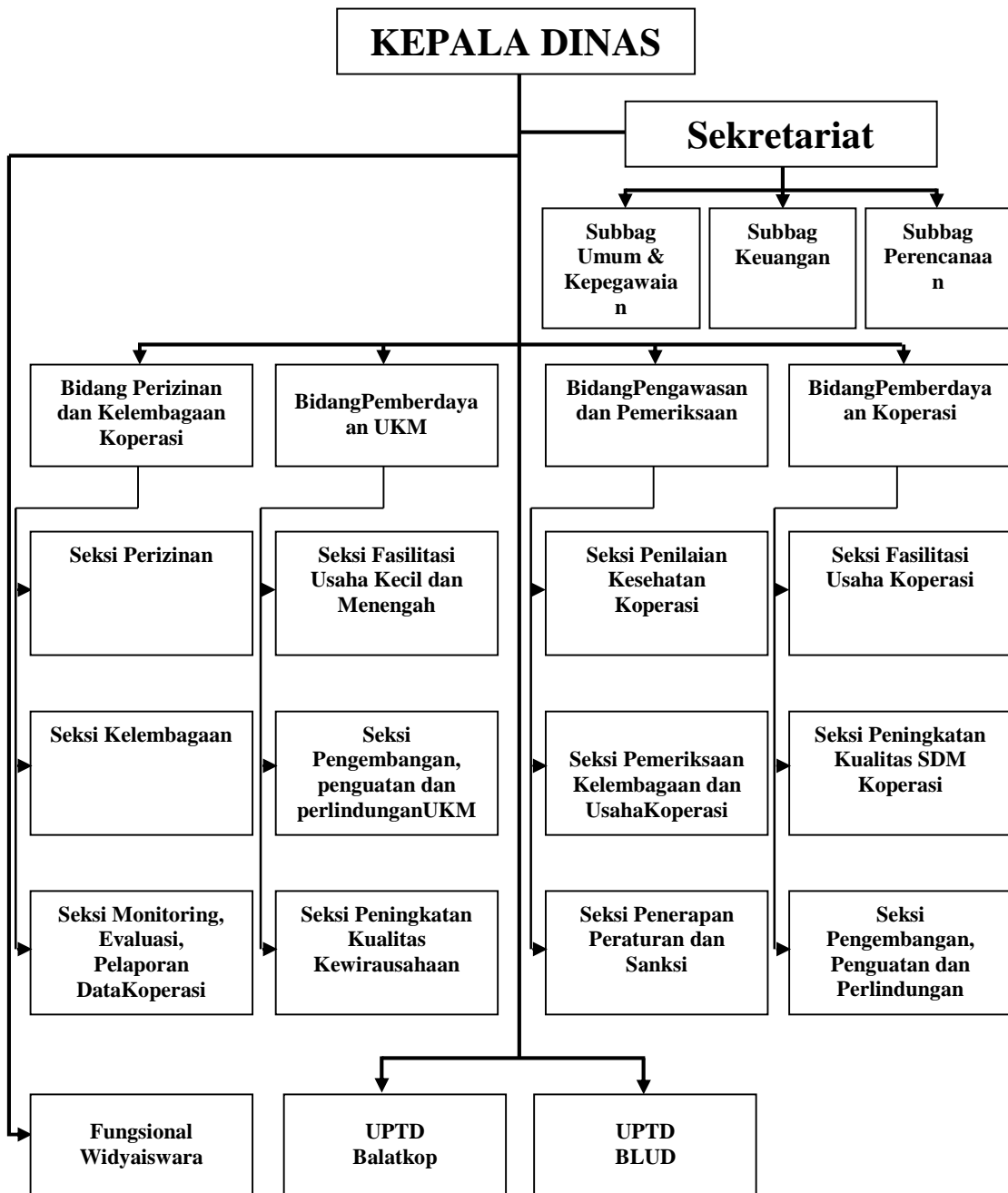
B. UPTD:

1. Fasilitas pendukung (kendaraan, meubelair, computer, LCD, Camera Digital) banyak yang tidak berfungsi
2. Sarana dan prasarana teknologi dan informasi belum memadai
3. Cakupan wilayah kerja UPTD Penguatan Modal sangat luas dan tidak seimbang dengan ketersediaan sumberdaya manusia dan faktor pendukungnya.
4. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas.
5. Fasilitas pendukung BALATKOP terbatas.

Berdasarkan hasil kajian terhadap faktor internal baik itu menyangkut kekuatan maupun kelemahan serta faktor eksternal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan Koperasi dan UKM, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran sehingga konsistensi perencanaan dan penganggaran kurang begitu terjamin.
2. Masih terdapat sumber dayamanusia yang memiliki skill dan kompetensi yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
3. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pelayanan dan pembinaan stakeholder.
4. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
5. Sebagian besar produk UKM belum dapat melakukan penetrasi pasar karena lemahnya daya saing.
6. Kualitas sumber daya pengelola Koperasi dan UKM masih rendah
7. Iklim usaha semakin ketat dalam persaingan dan semakin kurang kondusif terutama bagi koperasi dan UKM.
8. Pemahaman terkait dengan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha koperasi dan UKM masih rendah.

Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM 2015 – 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019.

2.1.1 Visi

Visi yang menjadi tujuan atau sesuatu keinginan ideal yang akan dituju pembangunan di Provinsi Lampung selama periode 2015 – 2019 adalah “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019, Dinas Koperasi dan UKM mendukung pencapaian Misi 1, yaitu:

“Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”

Misi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan cara merangsang dan memperkuat tumbuhnya gairah investasi di berbagai sector dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang

kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan agar proses menetes ke bawah (*trickle down effect*) berlangsung cepat dan berkesinambungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan yaitu hasil pengelolaan sumber daya yang didukung dengan kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan social yang berkeadilan . Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

2.1.3 Tujuan

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tabel. 2.1.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	20%	Persen
		2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	5%	Persen
		3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	1,2%	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	450%	Persen
		2 Jumlah UMKM	98.253	Unit
		3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	150%	Persen

2.1.4 Sasaran

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.4 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	KONDISI AKHIR (2019)
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	13%	20%
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	4,0%	5%
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,8%	1,2%
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	4 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	200%	450%
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	5 Jumlah UMKM	96.011	98.253
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	6 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	75%	150%

2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung didasarkan pada mandat hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait lainnya.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung harus berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (*good governance*) yang mencakup penataan peraturan perundangan sebagai berikut : a) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, d) Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS, e) Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi;

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara lokal, regional dan nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah.

Di sisi lain perlu pula untuk melakukan : Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti *One Village One Product* (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk

unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.

2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan.

Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

3. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live skill*). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara :

a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas

bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*life skill*) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator.

b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.

c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.

d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing.

e. Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah.

4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi.

Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (*awakening*), pemberdayaan (*empowering*), pengembangan (*developing*), penguatan (*strengthening*); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop);

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar.

5. Strategi peningkatan akses kepada sumberdaya produktif

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.

Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis.

2.1.6 Program untuk Mencapai Sasaran

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung periode 2015 – 2019 melaksanakan program-program, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.6. Program Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	DIDUKUNG JUMLAH PROGRAM	DIDUKUNG JUMLAH KEGIATAN
1.	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 (satu) program	7 kegiatan
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	1 (satu) program	5 kegiatan
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	1 (satu) program	3 kegiatan
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 (satu) program	3 kegiatan
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	1 (satu) program	5 kegiatan
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	1 (satu) program	1 kegiatan

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

Sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 pada diktum 3 mengintruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk membuat penetapan kinerja secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan capaian kinerja yang menggambarkan pencapaian baik berupa kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu yang menggambarkan hasil maupun manfaat. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung selama tahun 2017 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	13%
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	4,0%
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,8%
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	4 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	200%
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	5 Jumlah UMKM	96.011
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	6 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	75%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.113.000.000	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.446.409.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 120.000.000	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 405.706.000	APBD
5.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Rp. 2.191.080.000	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD PerkuatanPermodalan KUMKM	Rp. 884.019.000	APBD
7.	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Rp. 2.000.000.000	APBD
8.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 383.223.000	APBD
9.	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Rp. 934.982.000	APBD

10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	230.600.000	APBD
	Jumlah	Rp	9.709.019.000	
11.	Program Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi	Rp.	2.286.040.000	APBN (DK)
	Jumlah	Rp	2.286.040.000	
	Total	Rp	11.995.059.000	

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebesar Rp. 19.366.090.000 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.1 Rencana Belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017

NO	URAIAN	Rencana(Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	9.657.071.000	44.60
2.	Belanja Langsung	9.709.019.000	44.84
3.	Dana APBN	2.286.040.000	10.56
	Jumlah	21.652.130.000	100

Secara rincian pagu anggaran untuk membiaya target kinerja tahun 2017 dalam membiayai program-pogram prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN	ANGGARAN (%)
1.	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	6,393,304,000	100
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal	2 Persentase pertumbuhan		

	dari pelaku koperasi		tenaga kerja sector koperasi		
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi		
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru		
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	5	Jumlah UMKM		
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	6	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten		

BAB. III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan adalah untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan 2 rumus perhitungan. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Semakin Tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91	Sangat Tinggi	
2.	76 - 90	Tinggi	
3.	66 - 75	Sedang	
4.	51 - 65	Rendah	
5.	50	Sangat Rendah	

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan IKU ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PER/20/M.PAN.RB/11/2008. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah untuk memperoleh:

1. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing IKU yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berasal dari capaian kinerja pada masing-masing IKU. Selama tahun 2017, dari 6 (enam) indikator IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tergambar perbandingannya dengan realisasi kinerja tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1. Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2017

No.	Indikator	2017			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	13%	17,91%	138	20%	89,55
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	4%	6,16%	154	5%	123,2
3	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,8%	0,62%	77,5	1,2%	51,67
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	200%	320%	160	450%	71,1
5	Jumlah UMKM	96.011	99.307	103	98.253	101
6	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	75%	108,33%	144	150%	72,2

Dari 6 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2017, 5 (lima) indikator menunjukkan capaian diatas 91 dengan kriteria penilaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 (satu) indikator menunjukkan capaian di antara 76 – 90 dengan kriteria penilaian kinerja “Tinggi”. Tingkat

capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 5 (lima) indikator (83,35%) dengan kriteria kinerja sangat tinggi (ST).

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut

Tabel 3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2017 Pertriwulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	Persen	13%	Triwulan I	10%	14%	-
					Triwulan II	11%	15%	-
					Triwulan III	12%	16%	-
					Triwulan IV	13%	17,91%	138
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	Persen	4%	Triwulan I	3,2%	4,3%	-
					Triwulan II	3,5%	5,0%	-
					Triwulan III	3,7%	5,6%	-
					Triwulan IV	4%	6,16%	154
3	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	Persen	0,8%	Triwulan I	0,65%	0,48%	-
					Triwulan II	0,7%	0,52%	-
					Triwulan III	0,75%	0,58%	-
					Triwulan IV	0,8%	0,62%	77,5
4	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persen	200%	Triwulan I	125%	167%	-
					Triwulan II	150%	217%	-
					Triwulan III	175%	267%	-
					Triwulan IV	200%	320%	160
5	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	Jumlah UMKM	Unit	96.011	Triwulan I	94.641	96.195	-
					Triwulan II	95.097	97.232	-
					Triwulan III	95.553	98.269	-
					Triwulan IV	96.011	99.307	103
6	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	Persen	75%	Triwulan I	56%	58%	-
					Triwulan II	62%	75%	-
					Triwulan III	68%	92%	-
					Triwulan IV	75%	108,33 %	144

Sedangkan bila dilihat dalam perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan target PK 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3. Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017 dan Target PK 2018

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2017			Target 2018	
				Target	Realisasi	% Realisasi	Target RPJM	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	Persen	13%	17,91%	138	16%	16%
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	Persen	4%	6,16%	154	4,5%	4,5%
3	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	Persen	0,8%	0,62%	77,5	1,0%	1,0%
4	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persen	200%	320%	160	350%	350%
5	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	Jumlah UMKM	Unit	96.011	99.307	103	97.122	97.122
6	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	Persen	75%	108,33%	144	100%	100%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2017. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2017 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2017 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2017

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		PREDIKAT KERJA	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	92	92,07	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	94,67	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	79,53	Sangat Tinggi	Tinggi
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,22	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	100	98,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	95	66,61	Sangat Tinggi	Sedang
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	100	92,35	Sangat Tinggi	Tinggi
8	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	100	98,57	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	100	98,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	98,15	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	RATA-RATA JUMLAH	95,30	89,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Dari 10 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran terendah ada pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebesar 66,61 persen dari total anggaran pada program ini sebesar Rp. 1.459.381.695,-. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan yang mencapai 98,82 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2017

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7	
01	02.11.15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM			2.191.080.000		1.459.381.695	95	67
1	02.11.15.003	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	Jumlah KSP/USP dan KJKS/UJKS yang dinilai kesehatannya	25	61.990.000	25	61.953.000	100	100
2	02.11.15.010	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi	Jumlah peserta rapat Peningkatan dan perluasan akses	30	150.000.000	30	149.006.320	100	99

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		KUMKM	permodalan bagi KUMKM						
3	02.11.15.014	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	Jumlah temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	1	100.000.000	1	99.936.000	100	100
4	02.11.15.015	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota yang termonitoring dan terevaluasi	50	50.000.000	50	49.891.000	100	100
5	02.11.15.020	Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	Jumlah KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit yang terawasi pelaksanaan USPnya	10	96.250.000	10	96.082.000	100	100
6	02.11.15.025	Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	Jumlah Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	5	807.840.000	5	651.577.896	100	81
7	02.11.15.027	Pendataan dan pembinaan KUMKN	jumlah Pendataan dan pembinaan KUMKM	2	600.000.000	1	29.704.000	50	5
8	02.11.15.033	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	2	75.000.000	2	75.000.000	100	100
9	02.11.15.035	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	1	150.000.000	1	146.731.479	100	98
10	02.11.15.048	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	jumlah Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	10	100.000.000	10	99.500.000	100	100
02	02.11.16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM			884.019.000		816.348.400	100	92
1	02.11.16.001	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	12	600.000.000	12	532.599.400	100	89
2	02.11.16.004	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	jumlah KUMKM yang termonitor dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUDnya	140	100.000.000	140	99.755.000	100	100
3	02.11.16.005	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	jumlah peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	90	184.019.000	90	183.994.000	100	100
03	02.11.19	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi			2.000.000.000		1.971.316.499	100	99
1	02.11.19.016	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	521	2.000.000.000	521	1.971.316.499	100	99
04	02.11.20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan			383.223.000		378.707.600	100	99
1	02.11.20.009	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	jumlah peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	65	267.925.000	65	264.543.000	100	99
2	02.11.20.011	Peningkatan	Jumlah peserta	30	62.458.000	30	61.504.600	100	98

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		pemahaman terhadap aturan perkoperasian	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian						
3	02.11.20.012	Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	Jumlah peserta Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	30	52.840.000	30	52.660.000	100	100
05	02.11.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM			934.982.000		917.682.000	100	98
1	02.11.21.001	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	2	127.062.000	2	122.853.200	100	97
2	02.11.21.002	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15	313.320.000	15	307.186.000	100	98
3	02.11.21.003	Workshop Revitalisasi Koperasi		50	100.000.000	50	98.030.000	100	98
4	02.11.21.014	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15	94.600.000	15	94.540.000	100	100
5	02.11.21.047	Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	Jumlah Peserta pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	50	100.000.000	50	97.901.000	100	98
6	02.11.21.048	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi	60	100.000.000	60	97.201.800	100	97
7	02.11.21.049	Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	jumlah peserta Diklat Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	40	100.000.000	40	99.970.000	100	100
06	05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.113.000.000		1.024.784.374	92	92
1	05.04.15.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat	12	2.000.000	0	0	0	0
2	05.04.15.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan penyediaan rekening telepon, air dan listrik	12	225.000.000	12	154.213.050	100	69
3	05.04.15.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	340.600.000	12	339.800.000	100	100
4	05.04.15.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	110.000.000	12	109.850.000	100	100
5	05.04.15.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12	18.000.000	12	18.000.000	100	100
6	05.04.15.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	15.000.000	12	15.000.000	100	100
7	05.04.15.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1	40.000.000	1	39.000.000	100	98
8	05.04.15.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	3	16.000.000	3	12.388.000	100	77

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		undangan	undangan						
9	05.04.15.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100
10	05.04.15.018	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10	177.900.000	10	177.645.324	100	100
11	05.04.15.022	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18	78.500.000	18	77.888.000	100	99
12	05.04.15.029	Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pameran dan promosi pembangunan	1	80.000.000	1	71.000.000	100	89
07	05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.446.409.000		1.369.248.198	100	95
1	05.04.16.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembiayaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	1.034.600.000	1	1.007.734.200	100	97
2	05.04.16.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1	265.734.000	1	259.684.000	100	98
3	05.04.16.018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	15.000.000	12	14.780.000	100	99
4	05.04.16.020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	121.075.000	12	77.049.998	100	64
5	05.04.16.024	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100
08	05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			120.000.000		95.440.000	100	80
1	05.04.19.026	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	Jumlah peningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi	12	120.000.000	12	95.440.000	100	80
09	05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan			405.706.000		402.532.500	100	99
1	05.04.20.001	Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan	13	44.000.000	13	43.964.000	100	100
2	05.04.20.022	Penyusunan data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang disusun	12	122.400.000	12	122.400.000	100	100
3	05.04.20.035	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Jumlah pembiayaan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	12	102.306.000	12	101.106.000	100	99
4	05.04.20.069	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja	10	85.000.000	10	84.312.500	100	99
5	05.04.20.077	Peningkatan Data dan Informasi	jumlah pembiayaan Peningkatan Data dan Informasi	12	52.000.000	12	50.750.000	100	98
10	05.04.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			230.600.000		227.801.300	100	99
1	05.04.25.025	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah rapat Musrenbang SKPD	1	230.600.000	1	227.801.300	100	99
			JUMLAH	1	9.709.019.000	1	8.663.242.566	99	89

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2017 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 sudah seluruhnya mencapai 100 persen kecuali pada program administrasi perkantoran yang hanya 92 persen. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya kesalahan penyusunan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan umkm yang kinerjanya 95 persen hal ini dikarenakan terjadinya pemangkasan anggaran yang menyebabkan kegiatan Pendataan dan Pembinaan UMKM tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan.

Sedangkan untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2017 sebesar 89,23 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.709.019.000,-. Hal ini berarti ada 10,77 persen dari total anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 atau sebesar Rp. 1.045.776.434,- yang tidak terserap. Serapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Pendataan dan pembinaan KUMKM yang hanya sebesar 4,95 persen. Hal ini dikarenakan karena adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Selain itu serapan anggaran yang tidak terlalu tinggi juga ada pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya sebesar 68,54 persen. Hal ini dikarenakan penggunaan air listrik dan telepon yang memang tidak terlalu besar.

Secara rinci masing-masing realisasi kegiatan yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 2.000.000,-.
Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 0,- dan tidak dilaksanakan dikarenakan terkena rasionalisasi.
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 225.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 154.213.050,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 340.600.000,-
Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa

- administrasi keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 339.800.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 110.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 109.850.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 18.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 18.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 15.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 7. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 40.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 39.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan, dengan biaya Rp. 16.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 3 jenis. Terealisasi Rp. 12.388.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen
 9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 10.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 10.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 177.900.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordiansi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 10 kali. Terealisasi Rp. 177.645.324,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan biaya Rp. 78.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target 18 kali. Terealisasi Rp. 77.888.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 12. Pameran dan promosi pembangunan, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pameran dan promosi yang di ikuti dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 71.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 kegiatan yaitu:
 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 1.034.600.000,00,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 1.007.734.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 265.734.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 259.684.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 121.075.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 77.049.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerja adalah jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor target 12 bulan. Terealisasi Rp. 14.780.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 10.000.000,-. Indikatornya adalah Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 10.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan yaitu
 1. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 120.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta peningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi dengan target 40 orang. Terealisasi Rp. 95.440.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 5 kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 44.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah laporan keuangan dengan target 13 dokumen. Terealisasi Rp. 43.964.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 122.400.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data kepegawaian target 12 bulan. Terealisasi Rp. 122.400.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

3. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, dengan biaya Rp. 102.306.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 99.936.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 4. Penyusunan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 85.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dengan target 10 dokumen. Terealisasi Rp. 84.312.500,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 5. Peningkatan data dan informasi, dengan biaya Rp. 52.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah penyusunan data dan informasi dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 50.750.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan musrenbang SKPD dengan biaya Rp. 230.600.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah pelaksanaan musrenbang dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 227.801.300,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM dengan 10 kegiatan yaitu :
1. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS dengan biaya Rp. 61.990.000,-. Indikatornya adalah jumlah penilaian terhadap koperasi di Kabupaten/Kota dengan target 25 koperasi. Terealisasi Rp. 61.953.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM dengan biaya Rp. 150.000.000,-. Indikatornya adalah jumlah UKM yang memperoleh Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM dengan target 30 koperasi. Terealisasi Rp. 149.006.320,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah Temu konsultasi pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dengan target 70 UKM. Terealisasi Rp. 99.936.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 4. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota dengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kerjanya adalah Jumlah Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota yang termonitoring dan terevaluasi dengan target 50 koperasi. Terealisasi Rp. 49.891.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

5. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit dengan biaya Rp. 96.250.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit yang terawasi pelaksanaan USPnya dengan target 10 koperasi. Terealisasi Rp. 96.082.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 6. Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri dengan biaya Rp. 807.840.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri dengan target 5 kali. Terealisasi Rp. 651.577.896,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 7. Pendataan dan pembinaan KUMKN dengan biaya Rp. 600.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pendataan dan pembinaan KUMKM dengan target 2 kegiatan. Terealisasi Rp. 29.704.000 dan terlaksana sebesar 50 persen. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lampung.
 8. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah dengan biaya Rp. 75.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan dan promosi Produk-produk unggulan daerah adalah 1 event. Terealisasi Rp. 75.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 9. Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biaya Rp.150.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pendampingan bagi KUMKM se-Provinsi Lampung dengan target 250 orang. Terealisasi Rp. 146.731.479,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 10. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biaya Rp.100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan target 10 orang. Terealisasi Rp. 99.500.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan 3 kegiatan yaitu :
1. Peningkatan pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 532.599.400,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kumkm yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD dengan

- target 140 kumkm. Terealisasi Rp. 99.755.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
3. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLU, dengan biaya Rp. 184.019.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD dengan target 90 orang. Terealisasi Rp. 183.994.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan biaya Rp. 2.000.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM dengan target 521 orang. Terealisasi Rp. 1.971.316.499,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebelumnya telah merekrut Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang ditempatkan di 15 Kabupaten/Kota.
- 9) Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan dengan 3 kegiatan yaitu :
1. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur, dengan biaya Rp. 267.925.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur dengan target 65 orang. Terealisasi Rp. 264.543.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian, dengan biaya Rp. 62.458.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 61.504.600,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP, dengan biaya Rp. 52.840.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi

pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 52.660.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

10) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 7 kegiatan yaitu :

1. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi, dengan Biaya Rp. 127.062.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi dengan target 2 kegiatan. Terealisasi Rp. 122.853.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, maka dilaksanakan penilaian atas kinerja koperasi di Provinsi Lampung, untuk kemudian diberikan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Nama koperasi yang berprestasi sebagai berikut : Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sae (Bandar Lampung, KSPPS BMT Mitra Ummat Nasional (Lamteng), KJKS BMT Matarani (Lampura), KSPPS Wijaya Kusuma Kota gajah (Lamteng), KSPPS Bmt Familiet Lilalamin (Lamteng), Kopkar Mitra Abadi (Lamsel), Primer Koperasi Kartika (Lampura), Primkopal Kimal Lampung (Lampura), PRIMKOPPOLRES Lampung (Lamsel), KPN Talang Padang (Tanggamus)
2. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 313.320.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi kelembagan dan updating data keragaan koperasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 307.186.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Kegiatan ini mengupdate data jumlah koperasi yang ada di seluruh Provinsi Lampung melalui *Online Data Sistem*.
3. Workshop Revitalisasi Koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Penyuluhan bagi Anggota Koperasi dengan target 90 orang. Terealisasi Rp. 98.030.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
4. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 94.600.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah monitoring dan evaluasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 94.540.000 dan sudah dilaksanakan 100 persen
5. Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah

Jumlah pengurus koperasi yang lebih memahami tentang pengawasan kelembagaan koperasi dengan target 50 orang. Terealisasi Rp. 97.901.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

6. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi target 60 koperasi. Terealisasi Rp. 97.201.800,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
7. Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dengan target 40 orang. Terealisasi Rp. 99.970.000 dan sudah dilaksanakan 100 persen.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2017

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Povinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2017	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	13 %	17,91 %
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor koperasi	4,0 %	6,16 %
		3. Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,8 %	0,62 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	200 %	320 %
		2. Meningkatnya jumlah UKM yang dibina	2 Jumlah UMKM	96.011	99.307

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2017	REALISASI
1	2	3	4	5	6
		3. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	75 %	108,33 %

Melihat dari persentase capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung nampak cukup baik, hal ini terlihat dari indikator kinerja sasaran yang sudah banyak melebihi target.

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2017 sebanyak 5.325 unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 205 unit Koperasi dari jumlah koperasi per desember 2016 sebanyak 5.120 unit. Dari total koperasi yang ada sejumlah 5.325 unit Koperasi, terdiri dari 3.1221 (58,61 %) Koperasi yang aktif dan 2.204 (41,39 %) Koperasi yang tidak aktif. Bila dibandingkan dengan awal periode Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 17,64 persen dari target yang di pasang sebesar 13 persen pada tahun 2017. Adapun target yang blm tercapai seperti pertumbuhan jumlah volume usaha koperasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Mengingat data yang diperoleh bersumber dari Online Data Sistem (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI dan sampai saat ini sedang ada perbaikan data untuk meningkatkan kualitas data dikarenakan banyak kesalahan pengiputan data koperasi misalnya double input dan kesalahan input lain yang dilakukan oleh beberapa provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- ❖ Pada tahun 2017 ini Kementerian Koperasi dan UKM RI membubarkan koperasi yang tidak aktif yang berakibat pada turunnya volume usaha koperasi dan data terkait lainnya yang ada pada data ODS dan hal ini juga berpengaruh pada data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Dengan perbaikan data itu diharapkan adanya jumlah koperasi real, merupakan koperasi yang berkualitas yang dimungkinkan tumbuh lebih mudah sekaligus mudah diawasi dan dibina, dengan anggota dan volume usahanya yang

ditingkatkan. Pertimbangannya adalah untuk menciptakan system koperasi yang sehat demi tercapainya koperasi yang tangguh dan mandiri. Jumlah UMKM yang dibina sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 99.307 unit dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 96.158 unit. Sedangkan untuk pertumbuhan wirausaha baru yaitu sebesar 320 % dan Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten naik sebesar 108,33 % dibanding pada awal periode Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2014.

Dari uraian diatas, capaian kinerja yang sudah lebih baik dibanding tahun 2017. Namun untuk mencapai target sasaran utama strategis pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2015-2019, masih dibutuhkan anggaran yang memadai terutama untuk merevitalisasi koperasi-koperasi yang tidak aktif agar menjadi koperasi yang aktif serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Beberapa upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM yang telah dilakukan selama Tahun 2017 antara lain :

a. Pembiayaan Koperasi dan UMKM, melalui upaya:

- 1) Dana bergulir BLUD; Pada tahun 2017 telah terealisasi penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 4.105.000.000,- kepada 159 umkm. Perkembangan realiasi dana bergulir BLUD sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.4. Realiasi Dana Bergulir BLUD s/d Tahun 2017

NO.	KAB/KOTA	REALISASI DANA BERGULIR							
		TOTAL S/D TH 2014		TOTAL TH 2015		TOTAL TAHUN 2016		TOTAL TAHUN 2017	
		JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)
1	Bandar Lampung	370	7.707.500	37	875.000	24	645.000	33	985.000
2	Metro	98	2.119.000	4	140.000	10	370.000	2	40.000
3	Lamsel	220	4.570.000	24	620.000	23	710.000	46	910.000
4	Lampung Tengah	207	4.427.000	11	350.000	20	645.000	12	255.000
5	Lampung Utara	139	2.995.000	4	185.000	8	305.000	5	130.000
6	Lampung Barat	141	3.149.000	4	180.000	4	170.000	4	190.000
7	Tanggamus	42	1.025.000	1	15.000	1	20.000	2	40.000
8	Tulang Bawang	82	1.425.000	16	360.000	6	155.000	28	760.000
9	Lampung Timur	161	3.247.500	4	145.000	5	175.000	2	100.000
10	Pesawaran	87	1.754.000	2	65.000	4	110.000	3	90.000
11	Way Kanan	122	2.850.000	1	50.000	2	100.000	3	90.000
12	Pringsewu	167	3.765.000	14	360.000	9	320.000	7	40.000
13	Mesuji	56	849.500	21	410.000	7	225.000	4	165.000

14	T. Bawang Barat	85	1.657.500	3	100.000	7	160.000	7	105.000
15	Pesisir Barat	29	689.000	0	0	4	100.000	1	40.000
	JUMLAH	2.006	42.230.500	146	3.855.000	134	4.210.000	159	4.105.000

Sumber : UPTD BLUD Perkuatan Modal KUKM Provinsi Lampung

Realisasi Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 42.230.000.000,- yang didistribusikan kepada 2.006 UMKM, pada tahun 2015 penyaluran sebesar Rp 3.855.000.000,- kepada 146 UMKM sedangkan penyaluran tahun 2016 meningkat 9,2 % sebesar Rp 4.210.000.000,-. Pada tahun 2017 BLUD KUMKM Perkuatan Modal Provinsi Lampung menyalurkan Rp. 4.105.000.000,- kepada 159 UMKM yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD sebanyak 2.445 UMKM bertambah sebanyak 439 UMKM atau 22% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.006 UMKM. Total penyaluran Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 54.400.500.000,- yang didistribusikan kepada 2.445 KUMKM atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.170.000.000,- atau 28,81 % dari tahun 2014.

- 2) Penandatanganan MOU dengan LPDB untuk lebih meningkatkan penyaluran bantuan permodalan bagi KUMKM yang ada di Provinsi Lampung.
- 3) Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) yang sudah ada perda dan menunggu penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui upaya:

- 1) Pengoperasian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Provinsi Lampung
- 2) Pameran dan Promosi produk-produk unggulan KUMKM
- 3) Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi. Adapun penghargaan yang diberikan adalah :
 - a) Peresmian gedung dan pengoperasian PLUT KUMKM Provinsi Lampung
 - b) Bantuan pembiayaan dana bergulir dari UPTD Perkuatan Permodalan
 - c) Peluncuran Program Kampung Digital bekerjasama dengan PT. Telkom
 - d) Nama koperasi yang berprestasi sebagai berikut : Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sae (Bandar Lampung, KSPPS BMT Mitra Ummat Nasional (Lamteng), KJKS BMT Matarani (Lampura), KSPPS Wijaya Kusuma Kota gajah (Lamteng), KSPPS Bmt Familiet Lilalamin

(Lamteng), Kopkar Mitra Abadi (Lamsel), Primer Koperasi Kartika (Lampura), Primkopal Kimal Lampung (Lampura), PRIMKOPPOLRES Lampung (Lamsel), KPN Talang Padang (Tanggamus)

c. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM Melalui Diklat-Diklat dan Pelatihan Yang Berkesinambungan. Pelatihan itu antara lain :

- 1) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Manager/Kepala Cabang Koperasi
- 2) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Juru Buku
- 3) Pelatihan Kewirusahaan Berbasis Sumber Daya Lokal Dibidang Hasil Laut di Kabupaten Lampung Timur
- 4) Pelatihan Website dan Internet Marketing Bagi KUMKM
- 5) Pelatihan Menejemen Pemasaran Produk UKM
- 6) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kasir Koperasi
- 7) Pelatihan Menejemen Perkoperasian di Kota Metro
- 8) Pelatihan Kewirusahaan Bagi KUMKM Usaha Kopi Bubuk di Kabupaten Lampung Barat
- 9) Pelatihan Administasi Pembukuan Bagi Koperasi Baru
- 10) Pelatihan Kewirusahaan Bidang Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat
- 11) Pelatihan Kerirusahaan Bidang Informal (Produk Makanan Dan Aneka Jasa) di Kabupaten Lampung Selatan
- 12) Pelatihan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pelaksanaan RAT
- 13) Pelatihan Sertifikasi Bagi Marketing
- 14) Pelatihan Menejemen Usaha Kecil Bagi KUMKM
- 15) Pelatihan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
- 16) Bimtek Bagi Tenaga Pendamping
- 17) Diklat Perkuatan Modal Usaha Bagi UMKM Calon / Penerima Dana Bergulir BLUD
- 18) Diklat Dan Uji Kompetensi Bagi Fasilitator (Pembina KUMKM)
- 19) Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Aparatur Yang Membidangi Koperasi Dan Umkm
- 20) Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam
- 21) Diklat Dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi (Diklat Bagi Pengelola Koperasi Yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif dan UMKM yang Maju dan Berdaya Saing

Dari 6 (enam) indikator kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017, menunjukkan capaiannya sebagai berikut :

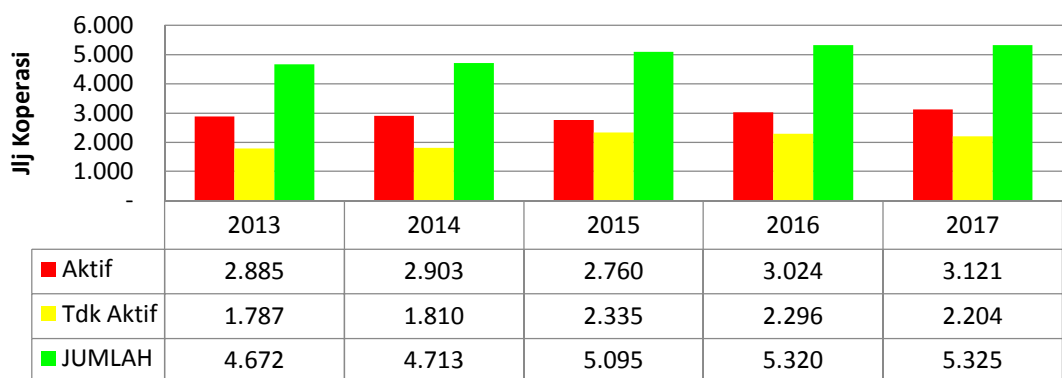
Tabel 3.4.2 Rencana IKU 2019 dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2019)	%
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	Persen	13%	17,91%	138	20%	89,55
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	Persen	4%	6,16%	154	5%	123,2
3	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	Persen	0,8%	0,62%	77,5	1,2%	51,67
4	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persen	200%	320%	160	450%	71,1
5	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	Jumlah UMKM	Unit	96.011	99.307	103	98.253	101
6	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	Persen	75%	108,33%	144	150%	72,2

a. Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif

Pada tahun 2017 target kinerja yang hendak dicapai sebesar 13% dan realisasi capaian 17,91% artinya adanya kenaikan jumlah koperasi aktif tahun 2017 atau mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya Koperasi baru, sehingga tingkat realisasi capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masih tergolong Sangat Tinggi (berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010) karena interval nilai realisasi kinerjanya diatas 91 yaitu 138. Sedangkan perkembangan jumlah Koperasi di Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat di bawah ini :

Grafik 3.4
Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2013-2017



Permasalahan Kinerja

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing produk Koperasi;
2. Keterbatasan pangsa pasar, diversifikasi maupun diferensiasi produk-produknya;
3. Aksesibilitas yang rendah terhadap sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan dan informasi), hal ini terjadi diperburuk oleh mekanisme pasar yang berkeadilan belum efektif berfungsi, dan belum optimal nya fungsi intermediasi perbankan sebagai mitra usaha koperasi.
4. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi merupakan kendala utama dalam pengembangan Koperasi

Solusi

1. Melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi (revitalisasi kelembagaan Koperasi) sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Perkoperasian kepada *stake holders* baik di Provinsi maupun Kab/Kota
3. Untuk mendukung standarisasi peningkatan mutu pengetahuan perkoperasian, perlu dilaksanakan Diklat bagi Pembina Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan dengan bunga rendah, bantuan sertifikasi tanah yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan modal, dan perlunya sosialisasi.
5. Melakukan Penyuluhan Perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang pentingnya berkoperasi
6. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalam upaya penumbuhan dan pengembangan Koperasi
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas program kegiatan penunjang keberhasilan dalam pemberdayaan Koperasi yang berkelanjutan dengan dukungan penuh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
8. Faktor penunjang lain untuk keberhasilan Program dengan optimalisasi :
 - a). Organisasi yang efektif dan efisien.
 - b). SDM pegawai yang memadai.
 - c). Perangkat hukum yang memadai.
 - d). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
 - e). Sumber daya manusia yang melimpah.
 - f). Sumber daya Alam melimpah.

b. Persentase pertumbuhan Tenaga Kerja sektor koperasi

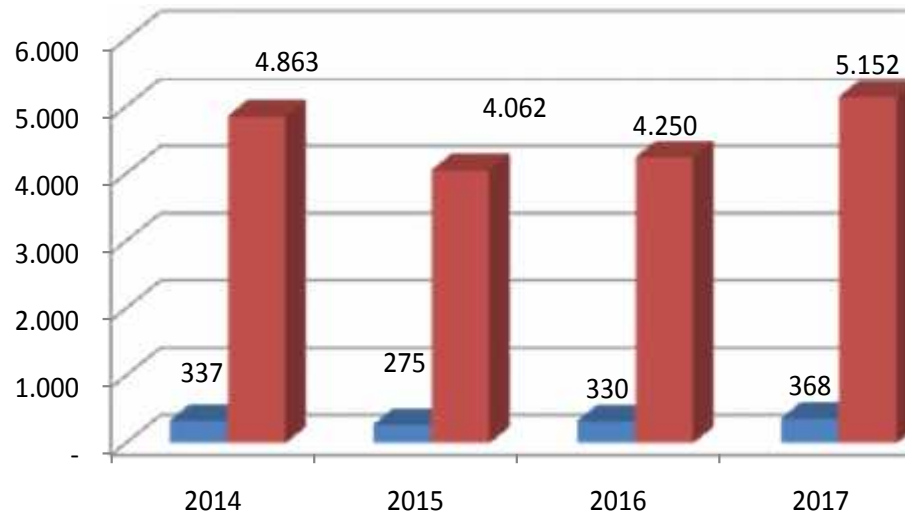
Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang dapat memberikan peluang usaha maupun terbukanya lapangan kerja baru di sebagian masyarakat menjadi semakin nyata. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi secara umum di kategorikan atas manajer dan karyawan.

Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap koperasi pada tahun 2017 sebanyak 5.520 orang yang terdiri dari manajer sebesar 368 orang dan karyawan sebesar 5.152 orang.

Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor koperasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,16% dari yang ditargetkan sebesar 4%, artinya pertumbuhan tenaga kerja sektor koperasi sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup berhasil yaitu berhasil meningkatkan jumlah tenaga kerja sektor Koperasi di Provinsi Lampung, sehingga dapat disimpulkan tingkat realisasi capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

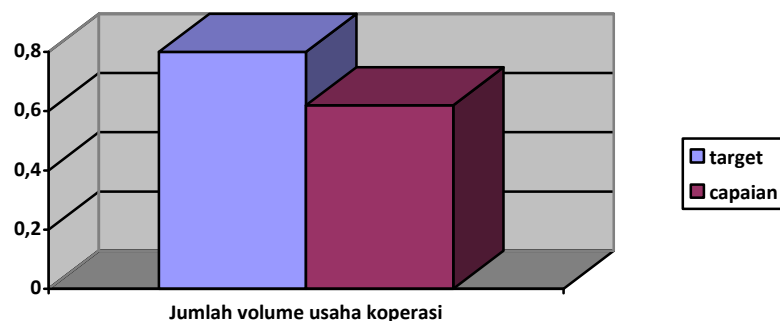
Lampung masih tergolong Sangat Tinggi (berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010) karena interval nilai realisasi kinerjanya diatas 91 yaitu 154.

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi (manajer dan Karyawan) Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 (orang)



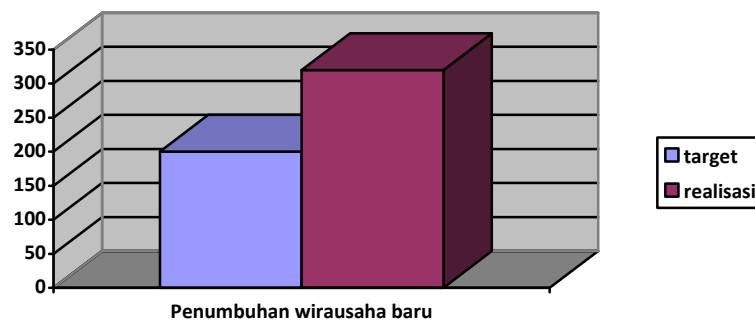
c. Persentase pertumbuhan rata-rata Volume Usaha (Omset) Koperasi

Target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 untuk Persentase pertumbuhan rata-rata Volume Usaha (Omset) Koperasi sebesar 0,8% dan realisasi capaiannya 0,62% menunjukkan Persentase pertumbuhan rata-rata Volume Usaha (Omset) Koperasi belum mencapai target, dikarenakan banyak koperasi tidak aktif yang dibubarkan, sehingga total jumlah volume usahanya berkurang. Sehingga dapat disimpulkan tingkat realisasi capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masih tergolong Tinggi (berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010) karena interval nilai realisasi kinerjanya diantara 76 – 90 yaitu 77,5.



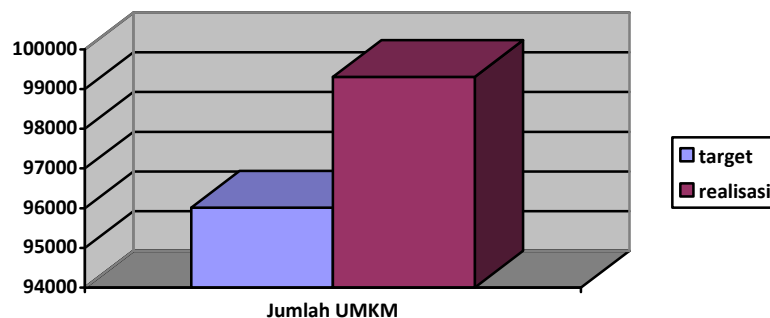
d. Persentase Penumbuhan wirausaha baru

Target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 untuk persentase penumbuhan wirausaha baru sebesar 200% dan realisasi capaiannya 320% artinya penumbuhan wirausaha baru sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup berhasil yaitu berhasil meningkatkan penumbuhan wirausaha baru di Provinsi Lampung, sehingga dapat disimpulkan tingkat realisasi capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masih tergolong Sangat Tinggi (berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010) karena interval nilai realisasi kinerjanya diatas 91 yaitu 160.



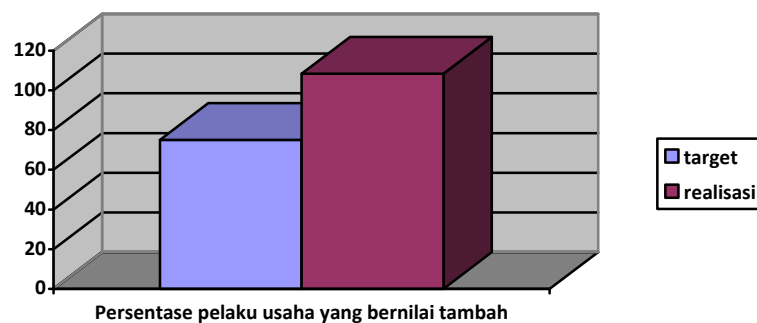
e. Jumlah UMKM

Target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 untuk Jumlah UMKM sebesar 96.011 unit dan realisasi capaiannya 99.307 unit artinya penumbuhan jumlah UMKM sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup berhasil yaitu berhasil meningkatkan jumlah UMKM di Provinsi Lampung, sehingga dapat disimpulkan tingkat realisasi capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masih tergolong Sangat Tinggi (berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010) karena interval nilai realisasi kinerjanya diatas 91 yaitu 103.



f. Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten

Target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 untuk Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten sebesar 75% dan realisasi capaiannya 108,33% artinya penumbuhan pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten belum mencapai target. Namun hal ini menunjukkan kinerja yang cukup berhasil yaitu berhasil, sehingga dapat disimpulkan tingkat realisasi capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masih tergolong Tinggi (berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010) karena interval nilai realisasi kinerjanya 144.



g. Penyaluran Dana Abadi PPK-BLUD

Strategi perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan melalui penyaluran dana bergulir Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai Permendagri No.61 tahun 2007 tentang PPK-BLUD dan Pergub Lampung No.39 tahun 2008 tentang Renstra Bisnis, Pola Tata Kelola dan SPM BLUD, dengan pencapaian per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Sumber dana : APBD I Lampung sebesar Rp 12 miliar dengan rincian; TA. 2003 sebesar Rp 4,55 Miliar, TA 2004 sebesar Rp 5,45 Miliar dan TA 2006 sebesar Rp 2 Miliar. Sedangkan total Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLUD sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 54.335.000.000,- yang disalurkan kepada 2.391 KUMKM Yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

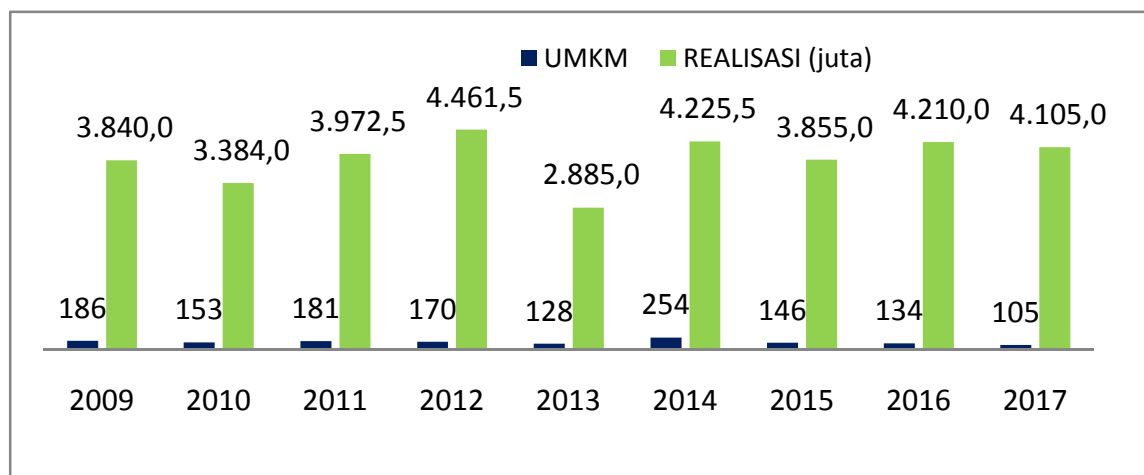
**REALISASI DANA BERGULIR BLUD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2017**

NO	KAB/KOTA	REALISASI DANA BERGULIR					
		TOTAL S/D TH 2015		TOTAL TH 2016		TOTAL TAHUN 2017	
		JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)
1	Bandar	407	8.580.500	24	645.000	33	985.000
2	Metro	102	2.259.000	10	370.000	2	40.000
3	Lamsel	244	5.190.000	23	710.000	46	910.000
4	Lampung	218	4.777.000	20	645.000	12	255.000
5	Lampung	143	3.180.000	8	305.000	5	130.000
6	Lampung	145	3.329.000	4	170.000	4	190.000
7	Tanggamus	43	1.040.000	1	20.000	2	40.000
8	Tulang	98	1.785.000	6	155.000	28	760.000
9	Lampung	165	3.329.500	5	175.000	2	100.000
10	Pesawaran	89	1.819.000	4	110.000	3	90.000
11	Way Kanan	123	2.900.000	2	100.000	3	90.000
12	Pringsewu	181	4.125.000	9	320.000	7	207.000
13	Mesuji	77	1.259.500	7	225.000	4	165.000
14	T. Bawang	88	1.757.500	7	160.000	7	105.000
15	Pesisir Barat	29	689.000	4	100.000	1	40.000
	JUMLAH	2152	46.020.000	134	4.210.000	105	4.105.000

Realisasi Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp 46.020.000.000,- yang didistribusikan kepada 2.152 UMKM, pada tahun 2016 penyaluran sebesar Rp 4.210.000.000,- kepada 134 UMKM sedangkan penyaluran tahun 2017 sebesar Rp 4.105.000.000,- kepada 105 UMKM. Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD sebanyak 2.391 UMKM bertambah sebanyak 105 UMKM atau 4,6% dari tahun 2016 yang berjumlah 2.286 UMKM.

Total penyaluran Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 54.335.000.000,- yang didistribusikan kepada 2.391 UMKM atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.105.000.000,- atau 8,17% dari Rp 50.230.000.000 tahun 2016, seperti terlihat pada kurva berikut ini :

**PERKEMBANGAN REALISASI DANA BERGULIR BLUD
TAHUN 2009 s/d TAHUN 2017**



3.5 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2017

APBD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2016 tanggal 12 September 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 25 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pelaksanaan akuntabilitas keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung memuat alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2017. Total anggaran APBD untuk belanja langsung adalah Rp. 9.709.019.000,00,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan belas ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 8.663.242.566,- (delapan milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sekitar 89,23%. Sementara penyerapan anggaran melalui dana APBN adalah 98,51%, dari alokasi anggaran Rp. 2.265.199.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 2.231.563.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Urusan	SKPD	Anggaran			
			Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)			Target	Realisasi	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	Persen	13%	17,91%	138			9.709.019.000	8.663.242.566	89.23	
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2. Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	Persen	4%	6,16%	154	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM				
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3. Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	Persen	0,8%	0,62%	77,5						
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	4. Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persen	200	320	160						

5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	5. Jumlah UMKM	Unit	96.011	99.307	103					
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	6. Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	Persen	75%	108,3%	144					
J U M L A H									9.709.019.000	8.663.242.566	89.23

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antar *output* dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena :

- Realisasi masukan lebih kecil dari target, realisasi keluaran diperoleh sesuai atau lebih dari targetnya.
- Realisasi masukan sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Perhitungan efisiensi dilakukan dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{[\text{UCORenc} - (\text{UCORrealisasi} - \text{UCORenc}) \times 100\%]}{\text{UCORenc}} - 100\%$$

Keterangan :

UCO (*Unit Cost Output*) merupakan rumus satuan harga yang perhitungannya berdasarkan pada harga per unit *output* antara rencana dan realisasi.

Hasil perhitungan analisis efisiensi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pada umumnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah sesuai dengan rencana dan capaian sasaran kinerja sebesar 138% untuk indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif, sebesar 154% untuk indikator kinerja Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi, sebesar 77,5% untuk indikator kinerja Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi, sebesar 160% untuk indikator kinerja Persentase pertumbuhan wirausaha baru, sebesar 103% untuk indikator kinerja Jumlah UMKM dan sebesar 144% untuk indikator kinerja Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten memberikan indikasi efisien, dengan capaian realisasi keuangan rata-rata mencapai 89,23% (kurang dari 100%).

Tabel 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	138	10,59	127,41
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	154	5.27	148,73
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	77,5	4.37	73,13
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	160	9.42	150,58
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	Jumlah UMKM	103	11.57	91,43
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	144	22,75	121,25

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah “Sangat Tinggi” berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 karena interval nilai realisasi kinerja di atas 91 untuk 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian realisasi capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif sebesar 138%, capaian kinerja Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi sebesar 154%, capaian kinerja Persentase pertumbuhan wirausaha baru sebesar 160%, capaian kinerja Jumlah UMKM sebesar 103% dan capaian kinerja Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten sebesar 144%. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja adalah “Tinggi” berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 karena interval nilai realisasi kinerja diantara 76 – 90 yaitu Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi sebesar 77,5%. Laporan ini disusun berdasarkan pada dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA-SKPD tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja tahun 2017 dan dokumen perencanaan lainnya.
2. Untuk pencapaian pelaksanaan 10 Program serta 48 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran seluruhnya Rp. 9.709.019.000,- terealisasi Rp. 8.663.242.566,- sehingga capaian sasaran strategis pada tahun 2017 mencapai 89,23%.
3. Berdasarkan pencapaian indicator kinerja dan realisasi anggaran di atas memberikan indikasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah efisien, dengan capaian realisasi keuangan rata-rata mencapai 89,23% (kurang dari 100%). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 127,41% untuk indicator kinerja Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif, sebesar 148,73% untuk indikator kinerja Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi, sebesar 73,13% untuk indikator kinerja Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi, sebesar 150,58% untuk indicator kinerja Persentase pertumbuhan wirausaha baru, sebesar 91,43% untuk indicator kinerja Jumlah UMKM dan sebesar 121,25% untuk indicator

kinerja Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten.

4. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

4.2. Saran

1. Tingginya pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2017 tidak lepas dari peran serta para pihak dalam mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut.
2. Pada tahun yang akan datang diharapkan pencapaian pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017 ini melalui peningkatan sinergitas dan koordinasi antar stakeholder kunci lainnya.
3. Agar terdapat sinkronisasi antara dokumen IKU, Dokumen Renstra, dan Rencana Penetapan kinerja perlu adanya review kembali dokumen tersebut agar lebih konsisten antar dokumen.
4. Perlu adanya perbaikan baik kuantitas maupun kualitas SDM atau pegawai teknis guna mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007